



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RENJA

RENCANA KERJA

2026



DINAS PENATAAN RUANG

#MenujuMakassarMULIA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat- Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026. Merupakan suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang di syaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790). Rencana Kerja merujuk pada RKPD kota makassar. Untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas Program dan Kegiatan yang akan direncanakan serta Pendanaannya.

Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan yang dalam prosesnya bermuara pada kebijakan Umum APBD Kota Makassar.

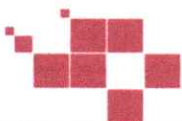
Makassar, September 2025

KEPALA DINAS

Dr. Ir. H. MUH. FUAD AZIS DM, ST., M.Si

Pangkat: Pembina TK. 1

NIP.19691019 200701 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025	6
2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 (Triwulan II).....	29
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang	42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	44
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penataan Ruang	70
3.3. Program dan Kegiatan.....	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja.....	74
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.....	76

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Ketersediaan Anggaran.....	84
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	84
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	85

DAFTAR TABEL

TABEL E.81 TAHUN 2024.....	16
TABEL T-C 29.....	23
TABEL E.81 Triwulan II TAHUN 2025.....	33
TABEL T-C 30.....	43
TABEL 2.3	46
TABEL T-C 31.....	49
TABEL T-C 32.....	58
TABEL 3.1	66
TABEL T-C 33.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

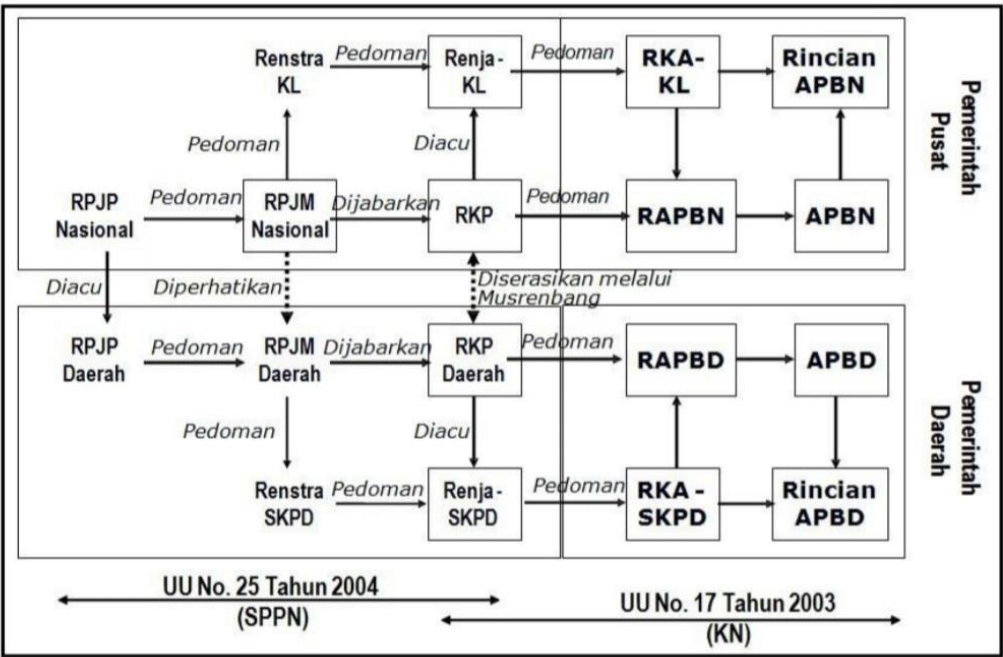
Rencana kerja (RENJA) SKPD adalah Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1





Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Komponen-komponen Renja ini mengacu pada RKPD Pemerintah Kota Makassar, dimana Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah menuju Kota Dunia dengan Program Makassar Metaverse (Makaverse) yang menjadi skala prioritas untuk menjawab tantangan satuan kerja yang bersangkutan. Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memuat indikasi daftar program kerja yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kota Makassar kepada Satuan Kerja yang bersangkutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\
2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik





Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Revisi RTRWN) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Bencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Sulawesi selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041; (lembaran daerah provinsi sulawesi selatan tahun 2022 nomor 3 Noreg peraturan daerah provinsi sulawesi selatan: (3-40/2022).
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota





Makassar Tahun 2015 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 61);
15. Peraturan Walikota Makassar No 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 No9mor 15)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah untuk memberikan arah dimensi kebijakan dan program dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Perencanaan, Pemanfaatan, pengendalian Ruang dan Bangunan dalam Penyusunan RKA Tahun 2026

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan untuk memberikan arah dimensi kebijakan dan program dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Perencanaan, Pemanfaatan, pengendalian Ruang dan Bangunan.





1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. Penyajian Renja SKPD dapat disusun berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangann awal RKPD Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN SASARAN

Bab ini menjelaskan : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan: Rencana Kerja SKPD, Pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Tahun 2024

Selama Tahun 2024, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah melaksanakan 3 program 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan, terdiri dari 1 program penunjang/pendukung 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan serta 2 program utama 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

Program pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terdiri atas urusan wajib (program strategis) dan urusan pilihan (program pendukung). Dalam penjabaran tersebut Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mempunyai 2 program Strategis dan 1 Program pendukung secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pendukung (Urusan Pilihan)

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Strategis (Urusan Wajib)

- Program Penataan Bangunan Gedung.
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana setiap program, kegiatan dan sub kegiatan hingga pada triwulan ke IV tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar untuk Urusan Bersama Penunjang maupun urusan wajib dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Target kinerja pada indikator 1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik sebesar 90 %, Persentase Ketersediaan laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% , Persentase ASN Perangkat Daerah Yang mendapat Peningkatan Kapasitas sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.991.618.286,- dari total anggaran Rp. 17.313.355.456,- dengan Persentase keuangan adalah sebesar 87% Adapun pencapaian target kinerja setiap kegiatan dan sub kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

target kinerja 100 % dengan capaian kinerja 90%. Dengan realisasi





anggaran sebesar Rp. 38.541.300,- dari total anggaran sebesar Rp. 54.341.700,-. Persentase keuangan sebesar 71% Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian target kinerja sebesar 80% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.022.000,- dari total anggaran sebesar Rp.31.644.500,- Persentase keuangan sebesar 54%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.169.000,- dari total anggaran sebesar Rp.5.442.800,- Persentase keuangan sebesar 95%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5,717.300,- dari total anggaran sebesar Rp.5.802.600,- Persentase keuangan sebesar 99%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.380.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- Persentase keuangan sebesar 85%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.253.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.451.800,- Persentase keuangan sebesar 97%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

Target Kinerja sebesar 100% capaian target Kinerja 100%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.558.580.175,- dari total anggaran sebesar Rp. 9530.983.356,-. Persentase keuangan sebesar 80%. Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja sebesar 100% dengan Capaian Kinerja sebesar 100% realisasi anggaran sebesar Rp. 6.964.986.100,- dari total anggaran sebesar Rp. 8.926.639.956,- Persentase keuangan sebesar 78,02%
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Target Kinerja 100% dengan capaian target kinerja sebesar 100% dari realisasi anggaran sebesar Rp. 349.520.000,- total anggaran sebesar Rp. 356.440.000,- Persentase keuangan sebesar 98,06%
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan,





Target Kinerja 100% dengan capaian target kinerja sebesar 100%, realisasi anggaran sebesar Rp. 244.074.075,- dari total anggaran sebesar Rp. 247.903.400,- Persentase keuangan sebesar 98,46%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD, Target Kinerja 0% dengan capaian target kinerja sebesar 0%, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari total anggaran sebesar Rp. 0,- Persentase keuangan sebesar 0%

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Target Kinerja 0% dengan capaian target kinerja sebesar 0%, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari total anggaran sebesar Rp. 0,- Persentase keuangan sebesar 0%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Target Kinerja 0% dengan capaian target kinerja sebesar 0%, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari total anggaran sebesar Rp. 0,- Persentase keuangan sebesar 0%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target Kinerja 100% capaian target kinerja 80%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.535.031,- dari total anggaran sebesar Rp. 145.500.000,-. Persentase keuangan sebesar 65% . Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Yaitu:

- Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.535.031,- dari total anggaran sebesar Rp. 145.500.000,-. Persentase keuangan sebesar 65%





d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Target Kinerja 100% capaian target 98 %. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.178.377.365,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.193.971.200,-. Persentase keuangan sebesar 99% Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Yaitu:

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian target kinerja sebesar 86% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.532.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 16.743.000,- Persentase keuangan sebesar 87%
- Penyediaan Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.065.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 19.828.200,- Persentase keuangan sebesar 86%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Target 2 jenis dengan capaian target 2 jenis dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.400.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 32.400.000,- Persentase keuangan sebesar 100%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Target Kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.114.380.365,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,- Persentase keuangan sebesar 99%

e. Pengadaan Barang Milik daerah, Target kinerja 100% capaian target 100%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.660.091.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.698.111.300,-. Persentase keuangan sebesar 98% Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah. Yaitu:

- Pengadaan Barang dan Mesin Lainnya, dengan Target Kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.660.091.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.698.111.300,- Persentase keuangan sebesar 98%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Target kinerja 100% capaian target Kinerja 97%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.878.576.722,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.966.018.900,-. Persentase keuangan sebesar 97% Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Yaitu:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target Kinerja 100% capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.212.604.400,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.241.126.900,- Persentase keuangan sebesar 98,73%





- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Target Kinerja 3 jenis capaian target kinerja 3 jenis atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 184.437.322,- dari total anggaran sebesar Rp. 221.892.000,- Persentase keuangan sebesar 83,12%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Target Kinerja 100% capaian target sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 481.535.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 503.000.000,- Persentase keuangan sebesar 76%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Target kinerja 100% capaian target 90%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 537.247.693,- dari total anggaran sebesar Rp. 602.893.500,-. Persentase keuangan sebesar 90%. Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Target Kinerja 1 unit capaian target kinerja 1 unit atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.300.880,- dari total anggaran sebesar Rp. 44.380.000,- Persentase keuangan sebesar 88,56%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Target Kinerja 100% capaian target kinerja sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 281.339.430,- dari total anggaran sebesar Rp. 302.803.500,- Persentase keuangan sebesar 93%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Target Kinerja 100% capaian target sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.110.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 73.880.000,- Persentase keuangan sebesar 52%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Target Kinerja 100% capaian target sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.497.383,- dari total anggaran sebesar Rp. 181.830.000,- Persentase keuangan sebesar 98%

Faktor Pendorong:

- Kinerja pegawai semakin meningkat dari tahun sebelumnya. serta memahami tugas dan fungsinya masing masing.

Faktor Penghambat:

- Masih minimnya anggaran yang ada pada Dinas Penataan Ruang terkait kegiatan pendidikan Peningkatan Kapasitas Pegawai dan





Pelatihan Formal

- Masih kurang sinerginya antara kebijakan yang dibuat dengan kinerja pegawai.

Tindak Lanjut :

- Lebih memaksimalkan sumber daya yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

B. Program strategis (Urusan Wajib)

1. **Program Penataan Bangunan Gedung**, Target Kinerja 65% capaian target kinerja sebesar 59% .Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.189.775.370,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.287.720.900,-. Persentase keuangan sebesar 92,39% pencapaian target kinerja kegiatan dari Program Penataan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut

- a. **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**,Target Kinerja 65% capaian target 59%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.189.775.370,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.287.720.900,-. Persentase keuangan sebesar 92,39% .Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Yaitu:

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat laik Fungsi (SLF) Peran tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SMBG, dengan Target Kinerja 65% capaian target kinerja sebesar 59% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.189.775.370,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.287.720.900,-. Persentase keuangan sebesar 92,39%

Faktor Pendorong:

- Peningkatan PAD
- Tertatanya Database Bangunan Ber-IMB
- Sebagai acuan dalam perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan pengembangan ruang
- Kebutuhan pemohon terhadap Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk memenuhi penyelenggaraan Bangunan Gedung yang andal;
- Kebutuhan terhadap Tim Profesi Ahli (TPA) untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung





- Adanya regulasi yang mengatur peran TPA di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung (Penerbitan PBG, penyelesaian masalah bangunan dan penyusunan regulasi). Diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Faktor Penghambat:

- Kota Makassar memiliki wilayah administrasi yang sangat luas dengan tim pelaksana kegiatan yang tidak memadai,
- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan terkait kegiatan tersebut sehingga kurang mendapat dukungan dan perhatian masyarakat
- Terbatasnya pengkaji teknis di kota Makassar yang melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan;
- Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan SLF sulit dipenuhi pemohon;
- Belum ada regulasi daerah yang mengatur kewajiban memiliki SLF bagi setiap bangunan gedung;
- Belum disahkannya Perda Bangunan Gedung Nomor 7 Tahun 2023 yang mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Tindak Lanjut :

- Meningkatkan sosialisasi pemahaman tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW tentang pentingnya pendataan ini dan riwayat bangunan.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (akademisi, asosiasi, praktisi) untuk memenuhi kebutuhan terhadap TABG dan pengkaji teknis;
- Melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
- Menyusun regulasi daerah berupa peraturan walikota yang mengatur tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
- Menerapkan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan SLF.
- Mempercepat pengesahan perda Bangunan Gedung yang menjadi acuan penyusunan perwali yang mengatur tentang TPA.





- 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**, capaian target sebesar 86%
.Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.349.712.228,- dari total anggaran sebesar Rp. 12.341.981.900,-. Adapun pencapaian target kinerja kegiatan dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**, Capaian target Kinerja 90%.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.970.610.986,- dari total anggaran sebesar Rp. 8.568.458.300,-. Persentase keuangan sebesar 93,02% Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota. Yaitu:

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultansi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota, dengan Target Kinerja 1 dokumen serta capaian target kinerja 1 dokumen atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.369.123.446,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.695.014.000,- Persentase keuangan sebesar 80,77%
- Penetapan RTRW Kabupaten/Kota, dengan Target Kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.601.487.540,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.873.444.300,- Persentase keuangan sebesar 96%

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**, Capaian target kinerja 49 %. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.878.464.472,- dari total anggaran sebesar Rp. 3.192.117.800,-

. Persentase keuangan sebesar 50% Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Yaitu:

- Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.651.598.020,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.747.160.200,- Persentase keuangan sebesar 95%
- Sistem Informasi Penataan Ruang, dengan capaian target kinerja sebesar 80% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.226.866.452,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.444.957.600,- Persentase keuangan sebesar 85%.





c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota, Target Kinerja 80% capaian target Kinerja 60 %. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 500.636.770,- dari total anggaran sebesar Rp. 581.405.800,-. Persentase keuangan sebesar 86,11% Adapun pencapaian dari setiap sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Yaitu:

- Operasional Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang, dengan kinerja sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 424.196.900,- dari total anggaran sebesar Rp. 474.506.600,- Persentase keuangan sebesar 89,40%
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan target Kinerja 12 rekomendasi capaian target kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.439.870,- dari total anggaran sebesar Rp. 106.899.200,- Persentase keuangan sebesar 71,51%.

Faktor pendorong :

- SDM yang memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam pelaksanaan forum TKPRD
- Pembinaan yang dilakukan terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bnagunan Gedung (PBG) atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah berjalan dengan baik, selain itu hal ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan oleh petugas lapangan berjalan dengan baik dan efektif.

Faktor penghambat :

- Pada kegiatan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota masih proses Penetapan Perkada Kota Makassar
- Kurangnya kesadaran pemilik bangunan dalam upaya menghindari pelanggaran-pelanggaran bangunan di lapangan.

Tindak lanjut :

- Mendorong Percepatan penetapan Perkada RRTR Kabupaten/Kota
- Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai stakeholder
- Peningkatan Sumber Daya Manusia
- Mengidentifikasi bangunan dengan cara sedini mungkin.





TABEL E.81 TAHUN 2024





Sasaran				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2				3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	90		90	90			11,48		19,67		22,21		35,77		89,13	90,00	89,13		
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	14.080.315.000	100	13.559.294,550	16.832.650.487	11,48	1.932.093.555	19,67	3.311.361.415	22,21	3.738.267.884	35,77	6.020.573.661	89,13	15.002.296.515	89,13				
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		Persen	90		90	90		11,48		19,67		22,21		35,77		89,13		99,03				
				Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SKPD yang disusun	Tahun	1	319.682.700	1	111.438.500	1	145,945,000	80.545.000	-	1	8.000.000		14.621.000	5	51.227.000	1	73.848.000	100,00	91,7	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	188.045.000	5	57.640.000	5	70,379,000	22.054.000	0	1	4.000.000	1	10.016.000	2	8.000.000	4	22.016.000	80,00	99,8	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokument RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	12.135.000	1	10.828.000	1	18,985,000	16.210.000	0	-	4.000.000	1	4.605.000		7.308.000	1	15.913.000	100,00	98,2	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokument perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12.043.000	1	10.688.000	1	15,720,000	10.995.000	0	-	0		-	1	7.320.000	1	7.320.000	100,00	66,6	



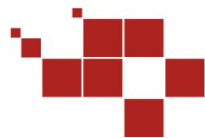


				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokument DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	96.285.700	1	22.342.000	1	20,746,000	16.206.000	0	0	0	0	1	14.799.000	1	14.799.000	100,00	91,3		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokument perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	11.174.000	1	9.940.500	1	20,115,000	15.080.000	0	0	0	0	1	13.800.000	1	13.800.000	100,00	91,5		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	10.759.253.474	1	6.067.801.043	1	8,430,771,736	7.519.051.919	0	1.015.126.851	0	2.159.125.352	1.282.415.410	75	2.062.001.394	1	6.518.669.007	100,00	86,7	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	51	10.129.642.174		5.429.621.543	51	7,814,632,936	6.853.354.119	51	880.036.851	51	2.007.555.352	51	1.133.115.410	51	1.864.512.894	51	5.885.220.507	100,00	85,9
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	263.640.000		303.670.000	12	314,520,000	342.360.000	3	85.590.000	3	85.590.000	3	85.590.000	3	79.410.000	12	336.180.000	100,00	98,2
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokument Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	286.407.500	10	268.106.000	10	225,774,000	243.774.000	10	49.500.000	10	61.080.000	10	61.260.000	10	62.236.000	10	234.076.000	100,00	96,0
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	17.284.000		21.899.500	1	15,434,000	17.284.000	0	0	0	0	1	14.097.000	1	14.097.000	100,00	81,6		
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	1	22.809.800		17.410.000	1	20,930,800	22.809.800	0	0	0	0	2.450.000	1	12.885.000	1	15.335.000	100,00	67,2	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	12	39.470.000		27.094.000	12	39,480,000	39.470.000	0	0	3	4.900.000	0	9	28.860.500	12	33.760.500	100,00	85,5	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor	Orang	12	54.000.000	12	31.000.000	12	48,000,000	195.000.000	0	6	28.000.000	28.000.000	0	70.000.000	6	126.000.000	50,00	64,6		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	12	54.000.000	12	31.000.000	12	48,000,000	195.000.000	0	0	6	28.000.000		28.000.000		70.000.000	6	126.000.000	50,00	64,6
					Jumlah Pengamanan barang milik daerah SKPD	Orang	4		4		4			0		2		0		4		4		100,00	0,0





				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia	Persen	90	209.350.000	90	475.490.526	90	343.650,000	804.941.936	0	229.646.014	4	91.388.260		243.820.662	0	204.560.000	4	769.414.936	4,44	95,6
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	159	89.350.000	159	203.750.000	159	103,650,000	108.450.000	0	0		0	137	101.400.000		0	137	101.400.000	86,16	93,5
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	71	120.000.000	40	271.740.526	40	240,000,000	696.491.936	26	229.646.014	4	91.388.260	10	142.420.662		204.560.000	40	668.014.936	100,00	95,9
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	584.100.000		1.404.366.099	1	558,499,264	1.301.136.400	1	117.560.125	1	345.988.902		216.078.807	64	597.573.147	1	1.277.200.981	100,00	98,2
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	0	0	0	42	59,368,900	99.216.400	0	0	10	8.851.250	30	58.374.000		26.792.000	40	94.017.250	95,24	94,8
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	14.420.000		15.670.000	4	31,640,000	67.960.000	0	0	2	39.000.000	2	19.300.000		0	4	58.300.000	100,00	85,8
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	19.680.000		19.200.000	2	27,960,000	27.960.000	0	0				13.980.000		13.980.000	-	27.960.000	0,00	100,0
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	273	550.000.000		1.369.496.099	116	396,000,000	1.106.000.000	13	117.560.125	25	298.137.652	14	124.424.807	64	556.801.147	116	1.096.923.731	100,00	99,2
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1	118.794.790		945.965.000	1	607,308,900	1.698.111.300	0	0	0	0		1.001.220.000	8	658.871.000	1	1.660.091.000	100,00	97,8
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	100	118.794.790		945.965.000	23	607,308,900	1.698.111.300	0	0		0	15	1.001.220.000	8	658.871.000	23	1.660.091.000	100,00	97,8
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	856.474.800	12	1.279.740.902	12	2,844,690,400	3.655.576.032	0	569.760.565	12	608.175.201		754.312.525	113	1.193.900.720	12	3.126.149.011	100,00	85,5
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Orang	155	630.474.800		765.666.192	112	2,070,307,200	2.220.422.400	108	529.276.178	107	509.876.524	109	500.876.524	110	570.732.237	108	2.110.761.463	96,43	95,1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	174.220.136		231.997.210	12	242,983,200	305.153.632	3	35.284.387	3	38.398.677	3	41.236.001	3	47.811.483	12	162.730.548	100,00	53,3



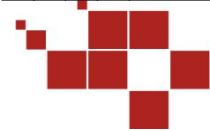


				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	51.873.000		282.077.500	12	531,400,000	1.130.000.000	3	5.200.000	2	59.900.000	6	212.200.000		575.357.000	11	852.657.000	91,67	75,5
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1.190.129.900		1.084.012.829	1	580,429,250	1.578.287.900	0	0	0	70.683.700		197.799.480	8	1.182.440.400	1	1.450.923.580	100,00	91,9
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	33.955.300		38.623.430	1	39,630,000	41.830.000	0	0	1	5.507.700	1	9.420.500	1	21.458.400	1	36.386.600	100,00	87,0
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	996.574.600		415.912.660	4	195,275,250	503.400.000	0	0	4	65.176.000	4	102.613.000	4	303.615.000	4	471.404.000	100,00	93,6
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	15	109.600.000		40.040.000	4	109,500,000	118.650.000	0	0	0	0	1	12.375.000	2	31.635.000	3	44.010.000	75,00	37,1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	50.000.000		589.436.739	1	236,024,000	914.407.900	0	0		0		73.390.980	1	825.732.000	1	899.122.980	100,00	98,3
Rata-rata capaian kinerja (%)																							75,00	89	
Predikat Kerja																							sedang	sedang	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB Kota	Persen	65	769.132.400	65	294.299.384	###	984,703,800	1.038.821.300	1,44	15.000.000	####	291.151.600	6,57	68.204.500	22,62	234.935.500	59	609.291.600	90,23	58,65
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata	persen	65	769.132.400	65	294.299.384	65	984,703,800	1.038.821.300	0	15.000.000	3	291.151.600	2	68.204.500	1	234.935.500	6	609.291.600	9,23	58,65
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan persyaratan bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	0	769.132.400		294.299.384	8	521,597,800	1.038.821.300	0	15.000.000	3	291.151.600	2	68.204.500	1	234.935.500	6	609.291.600	75,00	58,65





				Penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah bangunan Gedung yang telah dilakukan Penilikan oleh Penilik Gedung	Unit	0	0	0	2400	463,106,000	0	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						40,46	40,00		
Predikat Kerja																						Rendah	Sangat Rendah		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	80	5.106.168.600	80	9.901.247.248	80	4,272,851,900	5.655.640.400	0	0	1,98	111.978.500	5,40	305.245.000	52,17	2.950.624.628	28	3.367.848.128	34,99	59,55
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Persen	80	1.142.696.000	80	7.551.990.746	80	1,320,654,500	3.115.807.000	0	0	15	82.900.000	0	185.398.000	5	1.745.110.230	20	2.013.408.230	25,00	64,62
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	378.687.000	1	268.108.246	2	472,895,000	1.304.634.500	0	0		0	1	12.968.000	1	1.120.373.230	2	1.133.341.230	100,00	86,87
					Jumlah perda RTRW kota Makassar yang ditetapkan	PERDA RTRW	1		1		1			0						0		0,00		0,00	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	504.885.000	1	7.008.969.000	1	579,106,500	1.239.856.500	0	0	0	0	0	1	558.811.500	1	558.811.500	100,00	45,07	
					Jumlah Perwali RRTR dan KLHS yang ditetapkan	Perwali	1		1		1			0							0		0,00	0,00	
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	50	259.124.000	50	274.913.500	50	268,653,000	571.316.000	0	0	15	82.900.000	30	172.430.000	3	65.925.500	48	321.255.500	96,00	56,23
					Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	orang	50		50		50			0				0		0		0,00		0,00	
					Jumlah Peserta sosialisasi Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021	orang	50		50		50			0				0		0		0,00		0,00	
					Jumlah Peserta sosialisasi Permen ATR/BPN No.15 Tahun 2021	orang	100		100		100			0				0		0		0,00		0,00	

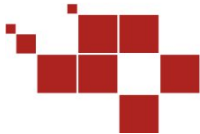




					Jumlah Peserta sosialisasi Permen ATR/BPN No.21 Tahun 2021	Persen	100	100				0		0		0		0		0		0,00	0,00			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	80	290.222.000	80	439.478.450	80	645.368.500	1.548.168.500	0	0	0	16.200.000		45.287.000		696.841.398	2	758.328.398	2,49	48,98
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen/ Laporan	1	290.222.000	12	296.351.450	1	77.689,000	1.200.489.000	0	0	0	0	0,50	32.167.000	0,50	409.200.498	1	441.367.498	100,00	36,77
					Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	1		1	143.127.000	1	567,679,500	347.679.500	0		0,33	16.200.000	0,33	13.120.000	0,33	287.640.900	1	316.960.900	99,00	91,16
						Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	aplikasi	1		1		1			0		0		0		0		0		0,00	0,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	80	3.673.250.600	80	1.909.778.052	80	2.306,828,900	991.664.900	0	0	0,5	12.878.500	2	74.560.000	3,50	508.673.000	6	596.111.500	7,50	60,11
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah bangunan diawasi yang pemanfaatan IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukan	Dokumen	12		12		12	1.601,902,900	871.858.900	0		0		2		3		5		41,67	55,88
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	1	2.393.329.600	1	1.710.820.552	1		0	0	0	0	0	0	74.560.000	0	412.642.500	0	487.202.500	0,00	0,00
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1		1	198.957.500	1	704,926,000	119.806.000	0		0		0		0	0	0		0,00	90,90
						Jumlah Rapat yang dilaksanakan dan Rekomendasi yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1.279.921.000	1		12		0	0	0,5		0		0,5		1		8,33	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							60,00	59,55		
Predikat Kerja																							Rendah	Rendah		
													23.527.112.18		1.947.093.55	49,6	3.714.491,5		4.111.717,3		9.206.133,7	18.979.436.243				



												7			5		8		15			84			89				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												80,67	80,67
Predikat kinerja dari seluruh program																												sedan g	sedan g





Tabel T.C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Makassar

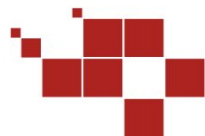
1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peragkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2025)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	03				PENATAAN RUANG									
1	1.03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	78.530.064.000	14.399.056.000	16,832,650,487	15,002,296,515	89,13	16.047.405.900	45.448.758.415	57,87
						PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH								
						PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN KAPASITAS								





1	1.03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2.538.638.500	319.628.700	80,545,000	73,848,000	91,69	55.650.000	449.126.700	18
1	1.03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	940.225.000	188.045.000	22,054,000	22,016,000	99,83	31.644.500	241.705.500	25,71
1	1.03	01	2.01	02	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	60.675.000	12.135.000	16,210,000	15,913,000	98,17	5.442.800	33.490.800	55,20
1	1.03	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	60.215.000	12.043.000	10,995,000	7,320,000	66,58	5.802.600	25.165.600	42
1	1.03	01	2.01	04	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	481.428.500	96.285.700	16,206,000	14,799,000	91,32	4.000.000	115.084.700	24
1	1.03	01	2.01	05	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	55.870.000	11.174.000	15,080,000	13,800,000	91,51	8.760.000	33.734.000	60,38
1	1.03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.129.712.020	10.704.058.114	7,519,051,919	6,518,669,007	86,70	10.462.979.100	27.685.706.221	47,63
1	1.03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Pokok PNS	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	55.378.514.520	10.154.250.614	6,853,354,1195	5,885,220,507	85,87	9.837.343.200	25.876.814.321	46,73
1	1.03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	1.318.200.000	263.640.000	342,360,000	336,180,000	98,19	351.400.000	951.220.000	72,16
1	1.03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.432.997.500	286.167.500	243,774,000	234,076,000	96,02	238.826.300	759.069.800	53
1	1.03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Yang Tersedia			17,284,000	14,097,000	81,56	4.716.000	18.813.000	
1	1.03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang Tersedia			22,809,800	15,335,000	67,23	8.702.800	24.037.800	
1	1.03	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Dokumen Yang Tersedia			39,470,000	33,760,500	85,53	21.990.800	55.751.300	



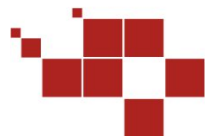


					SKPD									
1	1.03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor	252.000.000	0	195.000.000	126.000.000	64,62	0	126.000.000	50
1	1.03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor	252.000.000	0	195.000.000	126.000.000	64,62	0	126.000.000	50
1	1.03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia	1.306.750.000	245.000.000	804.941,936	769,414,936	95,59	798.215.200	1.812.630.136	138
1	1.03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	446.750.000		108,450,000	101,400,000	93,50	0	101.400.000	23
1	1.03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	860.000.000	245.000.000	696,491,936	668,014,936	95,91	54.000.000	967.014.936	112
1	1.03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.920.500.000	1.084.100.000	1,301,136,400	1,277,200,981	98,16	798.215.200	3.159.516.181	64,21
1	1.03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000		99,216,400	94,017,250	94,76	19.072.200	113.089.450	
1	1.03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	72.100.000	14.420.000	67,960,000	58,300,000	85,79	16.743.000	89.463.000	124
1	1.03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98.400.000	19.680.000	27,960,000	27,960,000	100,00	32.400.000	80.040.000	81,34
1	1.03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.750.000.000	1.050.000.000	1,106,000,000	1,096,923,731	99,18	730.000.000	2.876.923.731	61
1	1.03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1.731.234.900	247.602.950	1,698,111,300	1,660,091,000	97,76	1.352.353.200	3.206.047.150	188
1	1.03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1.066.234.900	10.000.000	-	-	-	399.523.200	409.523.200	38,40



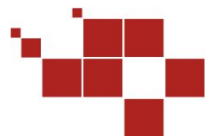


1	1.03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	665.000.000	237.602.950	1,698,111,300	1,660,091,000	97,76	952.830.000	2.850.523.950	428
1	1.03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.276.839.680	850.567.936	3,655,576,032	3,126,149,011	85,52	2.967.482.40	4.273.465.187	99,92
1	1.03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	3.152.374.000	630.474.800	2,220,422,400	2,110,761,463	95,06	2.216.390.400	4.957.626.663	157
1	1.03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	871.100.680	174.220.136	305,153,632	162,730,548	53,33	221.892.000	558.840.684	64,15
1	1.03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.365.000	45.873.000	1,130,000,000	852,657,000	75,46	529.200.000	1.427.730.000	563
1	1.03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6.314.613.900	822.694.300	1,578,287,900	1,450,923,580	91,93	356.726.000	2.630.343.880	42
1	1.03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	169.776.500	33.955.300	41,830,000	36,386,600	86,99	44.380.000	114.721.900	67,57
1	1.03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	4.979.237.400	692.939.000	503,400,000	471,404,000	93,64	189.346.000	1.353.689.000	27,19
1	1.03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	715.600.000	95.800.000	118,650,000	44,010,000	37,09	81.200.000	221.010.000	31
1	1.03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	715.600.000	0	914,407,900	899,122,980	98,33	41.800.000	940.922.980	131
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan gedung yang tertata	4.010.166.000	635.516.400	1,038,821,300	609,291,600	58,65	1.201.320.900	2.446.128.900	61
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten kota pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Kajian TABG, Jumlah Rekomendasi IMB, Jumlah Rekomendasi SLF	4.010.166.000	635.516.400	1,038,821,300	609,291,600	58,65	1.201.320.900	2.446.128.900	61



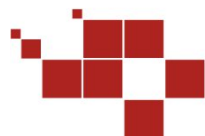


1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kajian TABG, Jumlah Rekomendasi IMB, Jumlah Rekomendasi SLF	4.010.166.000	635.516.400	1,038,821,300	609,291,600	58,65	1.201.320.900	2.446.128.900	61
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) , Sertifikat Laik Fungsi (SLF),Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG) Rencana teknisPembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik, dan Pendataan Bnagunan Gedung (melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) , Sertifikat Laik Fungsi (SLF),Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG) Rencana teknisPembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik, dan Pendataan Bnagunan Gedung (melalui SIMBG	-		-	-	-			
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	25.044.421.000	4.198.427.600	5,655,640,400	3,367,848,128	59,55	11.633.181.900	19.199.457.628	77
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	5.137.273.000	880.272.000	3,115,807,000	2,013,408,230	64,62	7.953.658.300	10.847.338.530	211
1	03	08	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kota Makassar	2.120.858.000	375.387.000	1,304,634,500	1,133,341,230	86,87	1.171.414.000	2.680.142.230	126
1	03	08	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota						1.171.414.000		
1	03	08	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR dan KLHS Kota Makassar	3.016.415.000	504.885.000	1,239,856,500	558,811,500	45,07		1.063.696.500	35,26
1	03	08	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota						6.782.244.300	6.782.244.300	
1	03	08	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta	1.273.326.000	230.734.000	571,316,000	321,255,500	56,23		551.989.500	43,35
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1.504.199.000	311.311.000	1,548,168,500	758,328,398	48,98	3.098.117.800	4.167.757.198	277





1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kajian Pemanfaatan Ruang	1.417.717.000	224.829.000	1,200,489,000	441,367,498	36,77		666.196.498	47
1	03	12	2.03	03	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Perseujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu berlaku						1.647.160.200	1.647.160.200	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	86.482.000	86.482.000	347,679,500	316,960,900	91,16		403.442.900	466
1	03	12	2.03	06	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang						1.450.957.600	1.450.957.600	
1	03	12	2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Bangunan diawasi yang pemanfaatan imbnnya tidak sesuai dengan peruntukan	17.129.623.000	2.776.110.600	991,664,900	596,111,500	60,11	581.405.800	3.953.627.900	23,08
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah bangunan diawasi yang pemanfaatan IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukan	11.695.498.000	2.062.749.600	871,858,900	487,202,500	55,88		2.549.952.100	22
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Jumlah Rapat yang dilaksanakan dan Rekomendasi yang dihasilkan	5.434.125.000	713.361.000	119,806,000	108,909,000	90,90	106.899.200	822.270.000	15,13
1	03	12	2.04	05	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang						474.506.600	474.506.600	





2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Tahun 2025 Triwulan II

Selama tahun 2025, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar melaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, terdiri dari 1 program penunjang/pendukung 7 kegiatan serta 20 sub kegiatan dan 2 program utama 4 kegiatan serta 8 sub kegiatan.

Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja pada triwulan I tahun 2025 dan penyebab untuk masing-masing program diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penataan Bangunan Gedung

Capaian pada Program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2025 triwulan II sebesar 19,14%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 265.707.930 dari pagu sebesar Rp 1.388.575.600. Pada Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Capaian Program Penataan Bangunan Gedung dipengaruhi oleh 2 faktor serta tindak lanjut. Yaitu :

Faktor Pendorong

- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) telah dilaksanakan di Kota Makassar
- Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan Penilik melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan PBG dan SLF melalui SIMBG

Faktor Penghambat

- Informasi kepada masyarakat terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG masih kurang
- Mahalnya biaya jasa konsultan perencana yang bersertifikasi dalam penyusunan dokumen rencana teknis untuk keperluan PBG
- Kurangnya SDM teknis dan tenaga profesi ahli dalam proses penyelenggaraan PBG dan SLF

Tindak Lanjut

- Sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan terkait PBG, SLF dan SIMBG
- Melakukan koordinasi dengan asosiasi dan instansi terkait dalam rangka percepatan dan kemudahan dalam proses pelaksanaan PBG
- Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM teknis dan tenaga profesi ahli





2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Capaian pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2025 triwulan II sebesar 7,46%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 776.357.160 dari total pagu sebesar Rp 10.403.855.380 . Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan

Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dipengaruhi oleh 2 faktor serta tindak lanjut. Yaitu :

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam membantu pencapaian penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Makassar.
- Proses penetapan Perkada RDTR dalam memenuhi kelengkapan dokumen administrasi loket persub RDTR serta monitoring dan asistensi berkala terkait kemajuan dari hasil perbaikan dokumen Ranperkada RDTR Kota Makassar.
- Peningkatan Intensitas Koordinasi dan konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat terkait Penetapan Perkada Rencana Detail Tata Ruang Kota Makassar.
- Tersedianya Revisi Perda RTRW Kota Makassar

Faktor penghambat :

Adapun faktor penghambat dari program ini adalah :

- Tingginya tingkat investasi dan Perkembangan kota Makassar yang semakin dinamis, mendorong pencapaian kegiatan penetapan Peraturan Daerah Rencana Rinci Tata Ruang Kota Makassar.
- Dana yang dialokasikan setiap tahun cukup konsisten, namun masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Keterbatasan anggaran ini menghambat kelancaran pelaksanaan beberapa tahapan penting dalam penyusunan dan pengembangan RDTR, yang berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Tidak adanya pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS) pada bidang penataan ruang
- Belum dilaksanakannya audit penataan ruang.
- Belum dilaksanakannya pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang
- Belum adanya perwali insentif dan disinsentif



Tindak lanjut :

- Peningkatan/menambah SDM dalam membantu pencapaian kegiatan tersebut
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja Tenaga Ahli dan Anggaran Pendukung lainnya untuk membantu pencapaian kegiatan tersebut.
- Penambahan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kegiatan Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 triwulan II sebesar 33% , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.238.941.498 dari pagu sebesar Rp 15.716.339.817. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Faktor pendorong dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

akuntabilitas dan kualitas kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan meningkat dari tahun sebelumnya.

Faktor penghambat

- Masih minimnya anggaran mobilitas dalam pelayanan umum
- Masih minimnya anggaran yang ada pada Dinas Penataan Ruang terkait kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
- Masih kurang sinerginya antara kebijakan yang dibuat dengan kinerja pegawai

Tindak lanjut dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lebih memaksimalkan sumber daya yang ada dan menambahkan alokasi anggaran dalam pelaksanaan pelayanan untuk peningkatan kualitas kinerja.





TABEL E.81 TRIWULAN I TAHUN 2025





2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penataan Ruang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah maupun dengan Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Penataan Ruang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis Penataan Wilayah yang meliputi :

1. Merumuskan kebijakan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
2. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan penataan bangunan;
3. Menyusun rencana dan program pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
4. Menyusun rencana dan program pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;
5. Menyusun rencana dan program pembinaan dan pengawasan penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan dokumentasi;
6. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

Hasil yang di capai dari pelaksanaan program-program dan kegiatan kegiatan yang ada pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memberikan gambaran pelayanan kinerja secara umum dapat memenuhi indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Semuanya tidak terlepas dari peran dilingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar serta peran masyarakat yang turut mendukung dalam pelaksanaan dilapangan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sudah memenuhi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Sehubungan dengan Tingkat kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang, perlu dilakukan pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia secara terencana dan sistematis dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan.

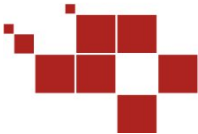




T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penataan Ruang
Kota Makassar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Raelisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2023	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RASIO KEPATUHAN IMB KOTA											
	Persentase bangunan gedung yang tertata			65%	65%	65%	65%	58,65%		65%	65%	
	KETAATAN TERHADAP RTRW											
	Persentase penyelenggaraan penataan ruang			80%	80%	80%	80%	60%		80%	80%	





2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian terhadap capaian kinerja.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2034 maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas.

Penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya akan dapat berjalan baik bilamana aturan mainnya dapat ditegakkan secara konsisten dan terkendali dalam situasi pembangunan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, beberapa permasalahan terkait urusan penataan ruang yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insentif-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota.
2. Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah yang secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, selain fungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan landmark. Untuk Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal.
3. Percepatan Rencana Tata Ruang Kota Makassar (RDTR) per kecamatan guna mendukung rencana pembangunan Kota Makassar kedepannya
4. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar belum optimal.
5. Keterbatasan Jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang dimiliki dibandingkan dengan besaran objek pengawasan
6. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualifikasi pendidikan teknis fungsional





Adapun Isu-isu strategis berupa ancaman dan peluang yang harus diantisipasi oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Opportunities (Peluang) meliputi :
 1. Bertambahnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
 2. Meningkatnya daya kritis masyarakat sehingga perlu dilaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, serta bermanfaat bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan.
- b. Threats (ancaman) meliputi :
 1. Kurang tegasnya aturan tentang pelaksanaan pengawasan pengendalian pembangunan
 2. Menurunnya pelaksanaan pengawasan melekat.
 3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan terkait penataan ruang.
 4. Citra birokrasi yang kurang baik dimata masyarakat
- c. Strenght (Kekuatan)
 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan tata ruang (Perda RTRW)
 2. Kelembagaan Dinas Penataan Ruang dalam kewenangan menyelenggarakan proses Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
- d. Weakness (Kelemahan)
 1. Lambatnya Pengadministrasian Pelayanan
 2. Kualitas SDM Belum sesuai Kebutuhan
 3. Database Pemanfaatan ruang belum tersedia/terkelolah dengan baik
 4. Mekanisme dan proses penyusunan peraturan tata ruang yang kompleks dan panjang
 5. Belum seluruh wilayah Kota Makassar memiliki turunan dokumen perencanaan tata ruang yang legal (Perkada RDTR/Zonasi, RTBL)

Untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis diatas maka Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut :





Tabel 2.3

Permasalahan/isu strategis	Strategi dan Kebijakan	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Program
Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insentif-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota	Meningkatkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan	Tersedianya Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Makassar (RRTR Kecamatan)	Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah	Program perencanaan tata ruang
	Konsisten	Persentase Bangunan ber IMB persatuan Bangunan	Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah	Program pemanfaatan ruang dan bangunan
		Persentase Kepatuhan terhadap RRTR dan RTRW	Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah	Program pengendalian pemanfaatan ruang
Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah	Meningkatkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten	Tersedianya Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Makassar (RRTR Kecamatan)	Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah	Program perencanaan tata ruang





Permasalahan/isu	Strategi dan		Indikator	
Strategis	Kebijakan	Sasaran Kinerja	Sasaran	Program
Diperlukannya Rencana Rinci Tata Ruang Kota Makassar (RRTR) per kecamatan guna mendukung rencana pembangunan Kota Makassar kedepannya	Meningkatkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten	Tersedianya Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Makassar (RRTR Kecamatan)	Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah	Program perencanaan tata ruang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel Analisa terhadap rancangan awal dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dilakukan untuk melihat perbandingan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD dengan analisa kebutuhan yang telah dilakukan. Analisa dilakukan agar terjadi sinergi terhadap program-program yang akan terakomodasi dalam rancangan dokumen perencanaan tahunan, hal ini sangat penting agar kebutuhan yang kemungkinan belum terakomodasi pada rancangan awal dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan akhir yang akan disepakati bersama semua stakeholder. Analisa kebutuhan yang telah dilakukan ternyata tidak menemukan adanya beberapa kegiatan yang belum terakomodasi pada rancangan sebelumnya.

Kegiatan yang lahir baik masukan dari masyarakat, melalui musrembang, maupun hasil analisa kebutuhan yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Semua telah terakomodasi dari rancangan awal.





Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renja SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disesuaikan dengan system SIPD yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Analisa serta penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan oleh masyarakat sebagai stakeholder dilakukan dengan tujuan menjangkau aspirasi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan karena seyogyanya masyarakat adalah pemangku kepentingan yang harusnya merasakan langsung dampak dari seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dari hasil musrembang Tingkat Kota Makassar, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar .

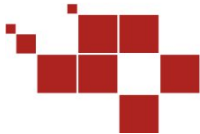




Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja a	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	03					PENATAAN RUANG										
1	1,03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%		





								PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%		
								PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS	90%				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN KAPASITAS	90%		
1	1,03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			
1	1,03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
1	1,03	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		





1	1,03	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen		
1	1,03	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	RKA-SKPDJumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	RKA-SKPDJumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen		
1	1,03	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	DPA-SKPDJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	DPA-SKPDJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen		
1	1,03	01	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	1,03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji Pokok PNS	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang		Penyediaan Gaji Pokok PNS	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang		
1	1,03	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		





1	1,03	01	2,02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		
1	1,03	01	2			Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah			Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah			
1	1,03	01	2,03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		
1	1,03	01	2,1			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia			
1	1,03	01	2,05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		
1	1,03	01	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		
1	1,03	01	2,1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Perangkat Daerah			
1	1,03	01	2,06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		



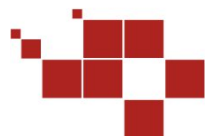


1	1,03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket		
1	1,03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		
1	1,03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
1	1,03	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			
1	1,03	01	2,07	06	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit		Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit		
1	1,03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit		
1	1,03	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			





1	1,03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
1	1,03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
1	1,03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
1	1,03	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
1	1,03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		
1	1,03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		





1	1,03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit		
1	1,03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Makassar	persentase bangunan gedung yang tertata	65%		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Makassar	persentase bangunan gedung yang tertata	65%		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten kota pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Makassar	Jumlah Kajian TABG, Jumlah Rekomendasi IMB, Jumlah Rekomendasi SLF			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten kota pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Makassar	Jumlah Kajian TABG, Jumlah Rekomendasi IMB, Jumlah Rekomendasi SLF			
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Makassar	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Makassar	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen		



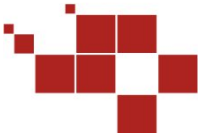


1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Kota Makassar	Ketaatan terhadap RTRW	85%		PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Kota Makassar	Ketaatan terhadap RTRW	85%		
1	03	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia			
1	03	08	2.01	01		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
1	03	08	2.01	02		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkada RDTR	1 Dokumen		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkada RDTR	1 Dokumen		
1	03	08	2.01	04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Laporan		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Laporan		
1	03	12	2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Laporan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Laporan			
1	03	12	2.03	01		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	10 Layanan		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	10 Layanan		





1	03	12	2,03	02		Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Sistem			Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Sistem						
1	03	12	2			KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Makassar	Jumlah Bangunan diawasi yang pemanfaatan imbnnya tidak sesuai dengan peruntukan				KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Makassar	Jumlah Bangunan diawasi yang pemanfaatan imbnnya tidak sesuai dengan peruntukan							
1	03	12	2,04	02		Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen			Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen						
1	03	12	2,04	04		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	12 Laporan			Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	12 Laporan						
TOTAL												TOTAL									

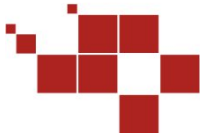




Tabel T-C 32

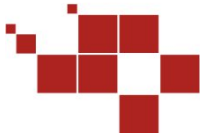
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026

NO	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PENATAAN RUANG				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%	
			PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	
			PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%	



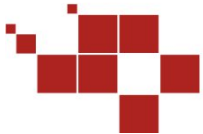


	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Tahun	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	RKA-SKPDJumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	DPA-SKPDJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	





	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	
	Penyediaan Gaji Pokok PNS	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	



	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	1 Tahun	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia	1 Tahun	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Makassar	persentase bangunan gedung yang tertata	100%	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten kota pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Makassar	Jumlah Kajian TABG, Jumlah Rekomendasi IMB, Jumlah Rekomendasi SLF	100%	

	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Makassar	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Kota Makassar	Ketaatan terhadap RTRW	100%	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	100%	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkada RDTR	1 Dokumen	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Laporan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Laporan		
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	10 Layanan	

	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Makassar	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Sistem	
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Makassar	Jumlah Bangunan diawasi yang pemanfaatan imbnnya tidak sesuai dengan peruntukan		
	Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	12 Laporan	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	
	Pemberian insentif danatau disinsentif non fiskal	Kota Makassar	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	12 Laporan	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah, dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio jumlah pegawai Dinas Penataan Ruang yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kualitas Pelayanan yaitu 100%, ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penciptaan keterpaduan Pembangunan Kota pada hakikatnya merupakan usaha peningkatan keserasian dan keseimbangan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan Kota tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Untuk pembangunan komitmen dan keinginan bersama tentunya harus dirumuskan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka Otonomi Daerah, dimana dituntut adanya paradigma pembangunan yang kreatif dan adaptatif terhadap semua potensi yang ada sejalan dengan perubahan yang dinamis dalam konteks globalisasi.

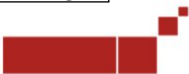
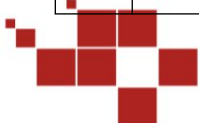
Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 yang ada pada Lampiran VI Permendagri No. 54 tahun 2010 (telaahan terhadap kebijakan nasional).





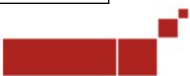
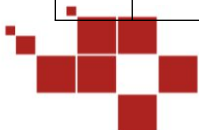
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan
Provinsi Kabupaten/kota Makassar

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementrian PUPR	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang - Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
2	Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kementrian PUPR	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung





			(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
3	Peningkatan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis	Kementrian ATR/BPN	- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang
4	Meningkatkan Pembinaan kelembagaan penataan ruang	Kementrian ATR/BPN	- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang	Kementrian ATR/BPN	- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-



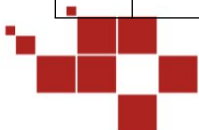


			undangan Bidang Penataan Ruang - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
6	Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur	Kementrian ATR/BPN	- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang - Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
B	Provinsi		
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Tarkim Prop.Sul-Sel	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang





			- Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang - Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
2	Peningkatan akses Pelayanan Perkotaan	Dinas Tarkim Prop.Sul-Sel	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang





			- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Gedung	Dinas Tarkim Prop.Sul-Sel	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

□ Tujuan

Tujuan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar :

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas.
- 2. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung dan Layanan Infrastruktur.
- 3. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan.

□ Sasaran

Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Makassar :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset Perangkat Daerah .
- 2. Terwujudnya Program Pembangunan Gedung sebagai Penunjang Layanan.
- 3. Terwujudnya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.





3.3. Program dan kegiatan

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - Pengamanan barang milik daerah
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



- Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan
- Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya





➤ Program Penataan Bangunan

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

➤ Program Penyelenggaran Penataan Ruang Kegiatan:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang
- Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang
- Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

3. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- Koordinasi pelaksanaan penataan ruang
- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektor Pembangunan Bidang Penataan Ruang
- Operasionalisasi tugas dan fungsi forum penataan ruang
- Pemberian insentif dan disinsentif non fiskal





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja dan Pendanaan berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar disertai dengan indikator dan juga pagu indikatifnya. Sebagaimana program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tahun 2026 melaksanakan 3 program, 11 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan, yaitu:
 9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD



- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
11. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- Pengamanan barang milik daerah
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 subkegiatan, yaitu:
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
13. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan
- Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya



➤ Program Penataan Bangunan

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

➤ Program Penyelenggaran Penataan Ruang Kegiatan:

4. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang
- Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang
- Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

6. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- Koordinasi pelaksanaan penataan ruang
- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
- Operasionalisasi tugas dan fungsi forum penataan ruang
- Pemberian insentif dan disinsentif non fiskal



4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang telah direncanakan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp 27.009.339.000 (Dua puluh tujuh milyar Sembilan juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

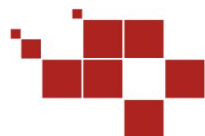
Demikian rincian secara singkat pagu anggaran untuk tahun 2026. Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Makassar tidak mencukupi dalam pengalokasian anggaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan





Tabel T-C 33
Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang Tahun 2026Dan
Perkiraan Maju Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PENATAAN RUANG								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	Kota Makassar	90%		PAD		90%	
	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%				100%	
	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS		90%				90%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Makassar	1 Tahun		PAD		1 Tahun	





Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	3 Dokumen		PAD		4 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Berita Acara		PAD		1 Berita Acara	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Tahun		PAD		1 Tahun	

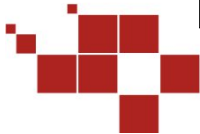


Penyediaan Gaji Pokok PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	60 Orang		PAD		60 Orang / bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	12 Dokumen		PAD		12 Dokumen	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen		PAD		12 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		12 Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		12 Laporan	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	0 Dokumen		PAD		0 Dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Makassar	4 Orang		PAD		4 Orang	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen		PAD		1 Dokumen	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	1 Laporan		PAD		1 Laporan	



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia	Kota Makassar	4 Orang		PAD		90%	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	154 Orang		PAD		160 Orang	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	13 Orang		PAD		25 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Tahun		PAD		1 Tahun	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	12 Paket		PAD		12 Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	12 Paket		PAD		12 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	12 Paket		PAD		12 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kota Makassar	5 Paket		PAD		3 Paket	



Verification

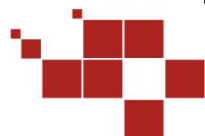


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Makassar	12 Dokumen		PAD		12 Dokumen	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		12 Laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	92 Laporan		PAD		100 Laporan	
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	1 Tahun		PAD		1 Tahun	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Makassar	1 Unit		PAD		1 Unit	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Makassar	5 Unit		PAD		5 Unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	10 Unit		PAD		10 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	1 Tahun		PAD		12 Bulan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		112 Laporan	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		12 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		12 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	1 Tahun		PAD		1 Tahun	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	1 Unit		PAD		1 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar	11 Unit		PAD		11 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	120 Unit		PAD		100 Unit	
PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar	1 Unit		PAD		1 Unit	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan gedung yang tertata	Kota Makassar	100%		PAD		100%	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten kota pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Kajian TABG, Jumlah Rekomendasi IMB, Jumlah Rekomendasi SLF	Kota Makassar	100%		PAD		100%	

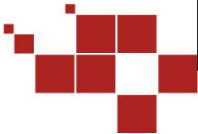


Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Makassar	12 Dokumen		PAD		12 Dokumen	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	Kota Makassar	100%		PAD		100%	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kota Makassar	100%		PAD		100%	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		1 Perda Dokumen	
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		2 Perwali, 50 KKPR	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Kota Makassar	1 Laporan		PAD		100 Orang Dokumen	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Kota Makassar	100%		PAD		100%	





Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Makassar	300 Layanan		PAD		300 Layanan	
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kota Makassar	1 Dokumen		PAD		5 Dokumen	
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Makassar	5 Sistem		PAD		2 Dokumen	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Bangunan diawasi yang pemanfaatan imbnnya tidak sesuai dengan peruntukan	Kota Makassar	80%		PAD		80%	
Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	12 Dokumen		PAD		12 Dokumen	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		12 Laporan	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Makassar	12 Laporan		PAD		12 Laporan	
Pemberian insentif danatau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Lihat	Kota Makassar	10 Berita Acara		PAD		10 berita Acara	



Verification



Bab IV – Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Ketersediaan Anggaran

Dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari usulan para pemangku jabatan dan program prioritas Pemerintah Kota Makassar sehingga Dinas Penataan Ruang Kota Makassar merumuskan 3 Program, 12 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Dengan alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran APBD tahun 2026 yang disesuaikan melalui sistem penganggaran SIPD, program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar harus menerapkan Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas.

Optimalisasi dan keterpaduan serta sinkronisasi dalam penganggaran program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.009.339.000 (Dua puluh tujuh milyar Sembilan juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang tercantum pada sistem penganggaran SIPD,-Demikian rincian secara singkat kebutuhan pagu anggaran untuk tahun 2026.

Apabila ketersediaan anggaran pemerintah kota Makassar tidak mencukupi dalam Pengalokasian anggaran Rencana kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap Program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Program kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sebagai stakeholder sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang komunikatif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia.

Dengan tetap mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar serta Visi dan Misi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dengan berbagai potensi yang mempengaruhinya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar merupakan





pedoman sebagai landasan dan pijakan dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Semoga dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini dapat diwujudkan dan diaplikasikan secara bersama-sama dari seluruh perangkat Pejabat Eselon dan Staf Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mempunyai kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan di tahun kedepannya, memberikan arah tujuan dan strategi dengan melakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Perlu peningkatan SDM aparatur dalam perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan Formal, Bimtek, Pelatihan, Seminar serta kegiatan yang lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
- Melakukan upaya sinkronisasi dan sinergitas sertiap pelaksanaan dan perencanaan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang kota Makassar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga transparansi dapat lebih terwujud;
- Menganalisa dan mengevaluasi capaian kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan berjalan dengan maksimal serta memberikan manfaat untuk kita semua.

Makassar, September 2025

KEPALA DINAS



Dr. Ir. H. MUH. FUAD AZIS DM. ST., M.Si

Pangkat : Pembina TK. 1
NIP.196910192007011018

